

**Buku
Saku**

7 Dalil

Umat Islam DKI dalam Memilih **Gubernur**

Penyusun **KH. Muhammad Taufiq Damas, Lc**

Pengantar **KH. DR. Ahmad Ishomuddin, MA. (Rois Syuriah PBNU)**



7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur

Penyusun

KH. Muhammad Taufiq Damas, Lc

Pengantar

KH. DR. Ahmad Ishomuddin, MA.

(Rois Syuriah PBNU)

RelaNU

(Relawan Nusantara)

Kata Pengantar

Non-Muslim Bukan Musuh Kita

KH. DR. Ahmad Ishomuddin, MA. (Rois Syuriah PBNU)*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaya Purnama”, yang Bahasa Arabnya adalah Ahok, saya dengar nama ini sejak saya kecil *ngaji* di pesantren, ketika membaca hadits Nabi “*unsur akhok dholiman wa mazluman*”. Jadi Ahok itu bukan Bahasa Cina tapi Bahasa Arab.

Ini Hari Santri, semua santri tahu apa arti “akhok”. Akhok artinya “saudaramu”. Jadi saya tadi nyebrang

laut dari Lampung ke sini untuk mengamalkan hadits Nabi, *“unsur akhok dholiman wa mazluman” tolong lah ahok (saudaramu) itu, baik kalau dia berbuat dzolim maupun dia di dzolimin.* Menolong saudara kita yang didzolimi dengan membantu dan membelanya, sedangkan “menolong” saudara kita yang berbuat dzolim dengan mencegahnya agar tidak berbuat dzolim. Mungkin Pak Ahok baru tahu juga kalau “akhok” itu Bahasa Arab yang artinya “saudaramu.

Yang saya hormati, Guru saya, Bapak KH. Masdar Farid Masudi, Rois Syuriah PBNU, juga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, para alim-ulama, para ustadz para ustadzah, hadirin-hadirot yang dimuliakan Allah.

Terenyuh sekali hati Saya mendengar Bapak Gubernur tadi bercerita tentang sumbasih beliau terhadap umat Islam di Jakarta, mulai dari pembangunan masjid, beasiswa untuk santri-santri madrasah, umrohkan marbot dan lain-lainnya. Saya mengukur kebenarannya dengan akal sehat saya, dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi, *engga* ada yang salah sama sekali, hanya belum dapat hidayah saja barangkali, menurut kita yaa.. menurut kita.

Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Saw, di mana saja harus terus menciptakan suasana

tawashaw bil haqqi saling memberi nasehat untuk melaksanakan kebenaran; *wa tawashaw bis-shabri* saling memberi nasehat untuk tetap bersabar, harus terus sabar, apalagi Pak Ahok, kasian ya dimaki-maki bukan hanya dari Jakarta, keliling di mana-mana dimaki-maki, ya salahnya dikit aja lah, ya kadang-kadang kepeleset lidahnya gitu, ya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu kadang kepeleset lidahnya. Dan terakhir *wa tawashaw bil marhamah* saling nasehat-menasehati untuk menebarkan kasih sayang, jangan benci membenci.

Hadirin sekalian,

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), musuh kita sebagai orang Islam bukan non muslim. Menurut agama yang kita anut, musuh kita ada tiga (3). Yang pertama orang-orang yang dzolim, dalam ayat Al-Quran disebutkan: *wa laa 'udwana illa ala dzolimin* tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang dzolim. Sedangkan kedzoliman itu bukan milik orang non muslim saja, orang Islam juga ada yang tidak adil, alias dzolim. Kalau ada orang Islam dzolim, maka akan jadi musuh semua orang, kalau ada non-muslim dzolim akan jadi musuh semua orang. Sepakat? *Sepakaat.*

Musuh yang kedua bagi umat manusia adalah setan. Setan itu dari kata “syathana” *al-bu’du ‘anil haq* yang jauh dari kebenaran, *albu’du an rahmatillah* yang jauh dari kasih sayang Allah sehingga dia tidak memiliki kasih sayang. Dan setan itu bisa dari jin dan manusia. Siapa setan itu? Setan itu yang suka memecah belah persatuan. *Yufariqqu bainal mar’i wa zaujihi*—“yang memisahkan seseorang dengan pasangannya” ini kelakuan setan. Menjauhkan manusia dari taat kepada agama: itu setan musuh kita, musuh kita bersama. Jadi ada kalau setan yang dari kalangan jin dan kalangan manusia, berarti ada “setan” dari kalangan orang Islam dan ada kalangan setan dari non muslim. Setuju? *Setujuuu...* Yang *gak* setuju nanti turun debat dengan saya.

Musuh yang ketiga musuh adalah hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? *innannafsa la ammaratun bis suu’* “sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan”. Itu musuh kita. Non muslim bukan musuh kita.

Kalau kita meneliti konsep Ibnu Khaldun dalam kitab *al-Muqaddimah*, ada lima siklus negara ini: yang pertama *masa perintisan*, yang kedua *masa pembangunan*, yang ketiga *masa keemasan*, yang keempat *masa kemunduran* dan kelima *masa keruntuhan*. Negara kita bisa runtuh. *Pengen enggak*

negara kita ini runtuh? *Enggaak*. Oleh karena itu orang NU harus jaga Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI tidak boleh dipertentangkan dengan agama dan tidak boleh hancur dengan kepentingan-kepentingan politik yang hanya sesaat.

Negara ini akan aman apabila semua penduduknya beriman apabila pemimpin dan rakyatnya betul-betul menjaga amanah. *Amiin Ya Rabbal alamin*. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuka hati masing-masing untuk bersikap adil dan menegakan keadilan. *Amiin Ya Rabbal alamin*.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

** Transkrip ini adalah ringkasan dari taushiyah yang disampaikan oleh KH Ahmad Ishomuddin dalam acara Peringatan Hari Santri, Jumat 21 Oktober 2016 oleh RelaNU di Wisma Antara, Jakarta.*

7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur

1 ▶ Bolehkah Muslim DKI Jakarta Memilih Gubernur Non-Muslim?

Boleh. Asalkan, gubernur bisa membawa kemaslahatan bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Dalilnya? *Ya*, dalam kaidah fiqih itu sudah disebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tasharruful imam ala ra'iyah manuthun bil mashlahah.

Artinya, kebijakan pemimpin berdasarkan kemaslahatan rakyat. Maka, bila pemimpin membawa kemaslahatan bagi rakyat, apapun agamanya diperbolehkan. Jadi, bisa membawa kemaslahatan pada rakyat itulah yang syarat mutlak bagi seorang pemimpin.

Soal agama gubernur yang non-muslim juga tidak ada masalah. **Imam al-Mawardi** sudah menjelaskan dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, bahwa para menteri dan gubernur hanya sebagai pembantu kepala negara dan sebagai pegawai/pejabat tinggi negara/pemerintah, yang dalam kajian *siyasah syar'iyah* disebut "*wizaratut tanfidz*" yakni dibenarkan adanya anggota kabinet, menteri, dan gubernur dari non-muslim. Dengan syarat membawa kemaslahatan dan keadilan.

Dalam sejarah Islam sudah banyak contohnya.

Di masa Khalifah 'Abbasiyah ke-16, **al-Mu'tadhid**, seorang Kristen taat bernama **Umar bin Yusuf**, diangkat sebagai Gubernur Provinsi al-Anbar, Irak. **Nashr bin Harun**, juga seorang Kristen, bahkan dipercaya menjadi Perdana Menteri di masa 'Adud ad-Daulah (949-982M), penguasa terbesar Dinasti Buyid di Iran.

Syaikh Prof. Dr. Ali Gumuah, Mufti Mesir telah memberikan fatwa kebolehan kepemimpinan non-muslim, karena bagi Syaikh Ali Gumuah, pemilihan pemimpin hendaknya berdasarkan pada “kompetensi, kemampuan dan kecakapan, bukan berdasarkan agama”—*al-kafa’ah wal kifayah wa laysa ad-din*. Apabila ada kemampuan dan kompetensi untuk menempati suatu jabatan tertentu termasuk dan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku yang meniadakan perbedaan pada agama.

Demikian pula dalam pandangan **Nahdlatul Ulama** tahun 1999, disebutkan “memilih pemimpin non-Muslim selama tokoh itu dianggap tidak jadi ancaman bagi umat Islam, boleh”.

2 ▶ Apakah Jika Umat Islam DKI Memilih Gubernur Non-Muslim Imanya Akan Hilang?

Tidak. Memilih gubernur itu soal manajemen dan administrasi pemerintahan, bukan soal *aqidah* dan bukan seperti memilih imam sholat yang harus pasti keimanan dan keislamannya.

Iman seseorang akan hilang apabila (1) menjadi *musyrik*, menyekutukan Allah Swt.

(2) apabila *kufur* (mengingkari/menentang) salah satu dan semua rukun iman dalam Islam Ahlus Sunnah Waljamaah (Iman pada Allah Swt, Malaikat-malaikat, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab sucinya, Hari Kiamat, dan Qadha'-Qadar [takdir] Allah).

(3) apabila seseorang menjadi *murtad*, atau keluar dari agama Islam.

Persoalan kepemimpinan (politik) yang disebut dalam bahasa Arab dengan *as-siyasah* tidaklah terkait dengan masalah akidah (iman dan kufurnya seseorang). Menurut **Imam Al-Juwaini**, yang

bergelar Imamul Haramain dalam fatwanya dalam kitab *al-Irsyad*:

إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد

*"Pembahasan dalam imamah (kepemimpinan)
bukan termasuk dasar-dasar akidah."*

Pendapat Imam Al-Juwaini ini untuk membantah konsep Syiah yang menyebutkan masalah imamah bagian dari dasar aqidah.

Demikian pula menurut fatwa **Imam Al-Ghazali** dalam kitabnya *Faishal Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah*:

والخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب
شئ من التكفير

Kekeliruan dalam dasar kepemimpinan, menentukan dan menetapkan syarat-syaratnya serta yang terkait dengannya tidak diperbolehkan terjadi pengkafiran (tuduhan kafir).

Demikian pula fatwa **Syaikh Ibn Taimiyah** yang menegaskan dalam kitab *Minhajus Sunnah an-Nabawiyah*:

الإمامة ليست من أركان الإسلام الخمسة .. أو من أركان الإيمان الستة

Kepemimpinan (politik) bukan termasuk rukun Islam yang lima atau bukan termasuk rukun iman yang enam.

Kesimpulannya, masalah pemilihan pemimpin tidak terkait dengan iman dan kafirnya seseorang, tetapi syarat-syarat pemimpin ditentukan atas dasar: kemampuan (*al-kafa'ah*), kecakapan (*al-kifayah*), keadilan (*al-'adl*), dan memperhatikan kemaslahatan rakyat (*mashalih ra'iyyah*).

3

► Bagaimana Sesungguhnya Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 51?

Menurut **Al-Habib Prof. Dr. M. Quraish Shihab**, Alumnus Doktor Jurusan Tafsir dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan Penulis Tafsir Al-Quran 30 Juz "*Tafsir Al-Mishbah*" serta Pakar Tafsir di Indonesia, menjelaskan tafsir Surat Al-Ma'idah ayat 51 sebagai berikut:

Tafsir Al-Ma'idah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi 'awliya'; sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (QS. Al-Maidah: 51)

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab *al-Quran dan Terjemahnya* oleh Tim Departemen Agama kata *awliya* diterjemahkan dengan *pemimpin-pemimpin*, sebenarnya merupakan terjemahan yang tidak sepenuhnya tepat. Kata '*wali*' jamaknya '*awliya*'. Maknanya bermacam-macam. Di Indonesia, kata ini populer sehingga ada wali kota, wali nikah, dst. Wali pada mulanya berarti "yang dekat". Karena

itu, *waliyullah* juga bisa diartikan orang yang dekat dengan Allah. Dengan begitu, wali kota itu berarti yang mestinya paling dekat dengan masyarakat. Orang yang paling cepat membantu Anda, ialah yang paling dekat dengan Anda. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti, *pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama*.

Adapun *wali* dalam pernikahan (apalagi terhadap anak gadis) sebenarnya fungsinya melindungi anak gadis itu sehingga tidak dibohongi oleh pria yang hanya ingin 'iseng'. *Awliya*, dalam konteks hubungan antarmanusia, berarti persahabatan yang begitu kental, sehingga tidak ada lagi rahasia. Kalau dalam hubungan suami-istri itu cinta yang melebur kepribadian. Dengan demikian, *awliya* bukan sebatas bermakna pemimpin.

Prof. Dr. M. Quraish Shihab menganalogikan dengan pertanyaan: **“Jika ada pilihan antara pilot pesawat yang pandai namun kafir, dan pilot kurang pandai yang Muslim, “Pilih mana?”** Pertanyaan lain: **“Pilih mana antara dokter Nasrani yang kaya pengalaman dan dokter Muslim tapi minim pengalaman?”** Dalam konteks seperti ini, menurut Prof. Quraish Shihab, memilih pilot yang kafir atau dokter nasrani tidak dilarang. Yang terlarang ialah melebur dan mengikuti agama mereka.

Sedangkan *asbabun nuzul* (sebab turun) Al-Ma'idah ayat 51 menurut **Syaikh Muhammad Thahir bin Asyur** dalam kitab *at-Tahrîr wat -Tanwîr* karena **sebab peperangan dan permusuhan terhadap umat Islam saat itu**. Setelah Perang Uhud di mana umat Islam menderita kekalahan terbesar melawan orang musyrik Mekkah. Kekalahan ini berdampak buruk pada mental masyarakat Madinah baik orang-orang muslim dan orang-orang non muslim yang menjadi sekutu mereka.

Setelah mengetahui kekalahan tentara muslim, penduduk-penduduk Madinah ada yang mulai ciut dan kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Mereka menganggap Nabi Muhammad Saw dan umat Islam tidak akan mampu menjadi pelindung dan sekutu yang kuat lagi.

Kemudian ada penduduk Madinah yang ingin membelot dan berkhianat dengan meminta bantuan dari pihak lawan. Dari mereka ada yang berkata "Aku akan meminta perlindungan kepada komunitas Yahudi." Ada pula yang berkata "Aku mau minta perlindungan pada orang Kristen di Syam (Suriah) dan menjadi sekutu mereka."

Maka, ayat 51 surat al-Maidah turun untuk mengecam orang-orang dalam konteks ini: berkhianat dan membelot pada pihak musuh. Jadi

illat (sebab) Al-Ma'idah 51 adalah pengkhianatan dan permusuhan terhadap umat Islam.

Sedangkan konteks saat ini di NKRI, tidak ada peperangan, negeri kita merupakan *Darus Salam* (Negeri yang Damai) meski bukan *Darul Islam* (Negara Islam). Dan **Kristen adalah salah satu agama yang resmi** di negara ini, penganutnya pun adalah Warga Negara Indonesia, bukan lawan, apalagi musuh. Oleh karena itu penggunaan Al-Ma'idah 51 untuk menyerang mereka yang hanya berbeda agama dengan Islam, merupakan sikap yang *tahawwur* (ngawur, sembrono), karena (1) perbedaan konteks (kita dalam suasana damai bukan perang) dan (2) *illatnya* untuk mereka yang memusuhi dan berkhianat pada umat Islam. **Maka umat agama non-Islam yang tidak memusuhi Islam tidak boleh diserang dengan ayat ini.**

4 ▶ Pernahkah Ada Gubernur Non-Muslim dalam Sejarah Khilafah Islam?

Ada. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, seorang non-Muslim pernah diangkat menjadi pemimpin (jika melihat konteks sekarang menjadi perdana menteri) untuk mengadakan delegasi kekhalifahan yang ada pada waktu itu.

Pada masa Khalifah Mu'awiyah telah diangkat sebagai bendahara seorang pendeta Kristen dari Damaskus yaitu **Pendeta John**. Sejarah mencatat bahwa di bawah kekuasaan Sultan Buwayhiyah, menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta menteri keuangannya sering kali adalah orang Kristen.

Di bawah kekuasaan Khalifah 'Abbasiyah ke-16 **al-Mu'tadhid**, seorang Kristen taat bernama **'Umar bin Yusuf, diangkat sebagai Gubernur Provinsi al-Anbar, Irak**. Nashr bin Harun, juga seorang Kristen, bahkan dipercaya menjadi perdana menteri di masa 'Adud ad-Daulah (949-982M), penguasa terbesar Dinasti Buyid di Iran.

Di bidang militer, tentara Muslim lebih dari sekali dipimpin oleh seorang jenderal Kristen; contohnya seperti pada masa khalifah 'Abbasiyah ke-15 al-Mu'tamid dan Khalifah ke-18 al-Muqtadir komando dipercayakan kepada perwira militer Kristen.

Demikian pula zaman Khilafah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Ada tokoh Yahudi bernama **Hasdai bin Saphrut** yang dilantik oleh Khalifah Abdurrahman III. Pada 949 M, dia ditugasi memimpin delegasi mewakili kekhalifahan Cordoba untuk melakukan pelbagai negosiasi yang tidak mudah dengan pihak asing. Khalifah Umayyah, yang saat itu telah 20 tahun memisahkan diri dari Baghdad, tertarik mengadakan kerja sama strategi dengan kaisar Byzantium di Konstantinopel. Kerajaan Kristen Timur yang berbahasa Arab memiliki musuh bersama, yakni kerajaan Abbasiyah di Baghdad yang dianggap menjadi ancaman kedua bagi kekhalifahan Umayyah.

Pertemuan antara dua negara berlangsung di tempat yang paling mewah di Andalusia yang bernama "Madinah al-Zahra." Dalam perundingan itu, Hasdai sukses untuk bekerjasama dengan Byzantium, dari situ lah Hasdai menjadi Duta Bani Umayyah di setiap perundingan dengan negara-negara lain. Selain Hasdai, Kekhalifahan Umayyah

juga menjadikan orang Kristen yang bernama **Rabi bin Ziyad** menjadi duta mewakili Khalifah Umayyah ke Istana Otto I. Hasil delegasinya, Istana Otto memberikan hadiah berupa air mancur untuk diletakkan di istana "Madinah al-Zahra."

Selain menjadi duta khalifah Umayyah, Hasdai juga ditugasi membuat ensiklopedia medis untuk diserahkan ke perpustakaan di Cordoba. Terkadang Hasdai meminta bantuan kepada seorang Uskup dari Konstantinopel untuk menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab.

Dalam hal ini meskipun Hasdai seorang Yahudi dan dibantu oleh seorang Kristen, apakah dia membuat makar sehingga kekhalifahan Umayyah hancur? Tidak, justru dia mengharumkan nama Khalifah Umayyah kepada negara yang dikunjunginya.

Kalau jaman Khilafah saja tidak tertutup pintu bagi non-Muslim yang cakap dan andal serta jujur untuk bisa berkiprah, apalagi untuk NKRI Indonesia di abad ke-21 ini.

5 ► Bagaimana Menentukan Pilihan Pemimpin (*Nashbul Imam*) menurut Islam Ahlussunnah Waljamaah?

Persoalan kepemimpinan dalam *fiqih* diposisikan dalam klasifikasi *fiqhus siyazah* (fiqih politik). Mencari kriteria pemimpin dalam tema *fiqih siyazah* ditemukan dalam persoalan memilih pemimpin atau kepala negara (*aqd al-imamah*).

Berikut ini kriteria atau syarat-syarat pemimpin menurut para ulama:

Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* menyebutkan bahwa syarat seorang pemimpin adalah: (1) memiliki sikap adil dengan segala persyaratannya; (2) memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan pada ijtihad; (3) memiliki pendengaran, penglihatan dan lisan yang sehat; (4) memiliki anggota tubuh yang utuh; (5) memiliki deposit wawasan yang mencukupi untuk mengelola kehidupan rakyat dan kepentingan umum; (6) memiliki keberanian untuk melindungi rakyatnya dan melawan musuh; (7) berasal dari keturunan Quraisy.

Abdurrahman ibn Muhammad **Ibn Khaldun** ada masa pertengahan Islam dalam kitab *Al-Muqaddimah* menuliskan lima syarat kepala negara yakni: (1) memiliki pengetahuan yang luas; (2) seorang yang adil; (3) mampu melaksanakan tugas sebagai kepala negara; (4) sehat fisik dan memiliki panca indera yang lengkap; (5) berasal dari keturunan Quraisy.

Syaikh Ibnu Taymiyah dalam *Majmu' Fatawa* menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin itu ada dua yakni: (1) orang yang kuat; (2) orang yang amanah.

Yang dimaksud orang kuat itu adalah seorang yang memiliki keberanian dan pengalaman menghadapi musuh dalam berbagai peperangan. Orang semacam ini adalah orang yang memiliki keterampilan memanah, menombak dan semacamnya. Karakteristik ini merujuk pada Surah al-Anfal (8) ayat 60 dan hadist Nabi Saw tentang keterampilan berkuda dan memanah. Seorang dikatakan kuat manakala dia memiliki kekuatan ilmu pengetahuan tentang keadilan dan cara melaksanakan hukum Allah. Sedangkan yang dimaksud memiliki amanah adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Menurut Ibnu

Taymiah, keadilan merupakan syarat terpenting bagi seorang pemimpin. Sedemikian pentingnya keadilan, Ibnu Taymiah mengatakan:

ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة
ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام

Sesungguhnya Allah menyokong negara yang adil meskipun kafir (pemimpinnya), dan tidak mendukung negara yang despostik meski pun Muslim (pemimpinnya). Dunia itu dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran dan keadilan dan dunia tidak dapat tegak dengan modal kedzaliman dan keislaman.

Kalimat Ibnu Taymiah di atas kiranya mengisyaratkan bahwa kepala negara yang mampu mengejawantahkan keadilan meskipun non-Muslim lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tetapi tidak mampu mengejawantahkan keadilan.

6 ► Bagaimana posisi Agama Islam di dalam NKRI yang berdasar Pancasila?

NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar adalah final bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan Keputusan Resmi Ormas Islam terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar ke-27 tahun 1984.

Salah satu tokoh perumus penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dan Khittah NU adalah **KH Ahmad Siddiq** (1926-1991). Kiai kharismatik asal Jember yang menjadi Rais Aam PBNU (1984-1991) ini adalah murid langsung KH. Hasyim Asy'ari dan pernah menjadi sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim.

Dalam Komisi I (*masa`il fiqhiyyah*) pada Mukhtamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, KH. Ahmad Siddiq menyampaikan gagasannya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus

dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya; sahnya kesepakatan, hasil kesepakatan dan keterikatan semua pihak itu berkelanjutan pada hal-hal berikut; kewajiban menurut wujud, asas dan hukum dasar Negara sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan; **kewajiban menjaga dan mengamalkan asas dan hukum dasar sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan, berarti kewajiban menjaga agar asas dan hukum dasar itu tidak disimpangkan dan diselewengkan**; kewajiban untuk taat kepada penguasa negara yang sah, dalam hal yang tidak mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan yang nyata. Dengan demikian, **Republik Indonesia adalah bentuk upaya final** seluruh nasyon teristimewa kaum muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara". **Sumber:** *Buku "Nahdlatul 'Ulama Kembali ke Khittah" 1926, (Penerbit Risalah Bandung, Mei 1985)*

Maka konsekuensi dari sikap NU itu adalah kesetiaan pada Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan kesetaraan dan persamaan Warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan aliran golongannya (SARA).

Kesetaraan dalam hak dan kewajiban itu, misalnya disebutkan dalam konstitusi kita: UUD 45 Pasal 27 ayat 1. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Demikian pula dalam Pasal 28 D, yang mengakui hak-hak warna negara: pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, perlakuan yang sama, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* Ayat (3) **Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**

Negara juga wajib melindungi dan memberikan kebebasan umat beragama. UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) menyatakan: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.* Setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Tapi negara harus menyediakan fasilitas

dan memastikan perlindungan kehidupan beragama.

Hukum agama tidak bisa dijadikan hukum formal, tapi prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal dengan *Maqashid as-Syari'ah* wajib masuk dalam prinsip-prinsip hukum formal, seperti yang telah dirumuskan oleh *Imam As-Syathibi* dalam *al-Muwafaqat*:

- (1) menjaga kebebasan beragama (*hifdu din/ حفظ الدين*),
- (2) menjaga hak hidup (*hifdu nafs/ حفظ النفس*),
- (3) menjaga akal sehat (*hifdz aqal/ حفظ العقل*),
- (4) menjaga keturunan/kehormatan (*hifdz nasl/ حفظ النسل*)
- (5) menjaga hak milik (*hifdz mal/ حفظ المال*).

7 ▶ Apakah Ahok Membawa Kemaslahatan bagi Umat Islam di Jakarta?

Sudah terbukti, kebijakan Gubernur Ahok prorakyat dan tidak elitis. Kebijakannya mendatangkan kemaslahatan masyarakat Jakarta, yang mayoritas adalah umat Islam. Dengan demikian, Ahok terbukti memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Berikut daftar Langkah Nyata dan Kepedulian **Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)** terhadap umat Islam di Jakarta:

1. **Ahok membangun** masjid di Balai Kota diberi nama **Masjid Fatahillah**. Masjid ini digagas di era Gubernur Joko Widodo, dilaksanakan dan diselesaikan di era Gubernur Ahok. Total dananya Rp18,8 Miliar. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur DKI Jakarta yang muslim, Balai Kota tidak memiliki masjid.
2. **Ahok membangun Masjid Raya Jakarta** Rp170 Miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat, yang

akan selesai pada akhir 2016. Masjid Agung ini dibangun di atas lahan seluas 17,8 hektare dengan luas bangunan 2 hektare, karena Jakarta belum memiliki masjid raya provinsi. Masjid Istiqlal adalah masjid Negara. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur Jakarta yang muslim, Kota Jakarta tidak memiliki Masjid Raya Provinsi.

3. **Membangun masjid-masjid** di setiap rusun yang dibangun: **Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda** (Jakarta Utara), dan **Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesakih** (Jakarta Barat).
4. **Memajukan Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) Jakarta Utara** sebagai etalase Keilmuan Keislaman dan Wisata Religi.
5. **Ahok memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, Musholla-Musholla dan Majelis Taklim.** (a) SK GUB No 2589 Tahun 2015. Ada 118 Musholla, masjid, dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan, dengan kisaran bantuan senilai Rp15 juta—Rp75 Juta. (b) SK GUB Nomor 308 tahun 2016, ada senilai Rp15 juta—Rp100 juta.
6. **Mulai Tahun 2016, KJP (Kartu Jakarta Pintar)** diberikan ke pelajar-pelajar sekolah Islam,

Madrasah (Ibtidaiyyah sampai Alyah). Total Anggaran KJP 2016 senilai Rp2,5 Triliun.

7. **Mulai Tahun 2016, Ahok memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul** kepada penerima KJP yang mendapatkan perguruan tinggi, setiap tahun memperoleh Rp18 juta. Pada tahun 2017 dianggarkan Rp.2.7 Triliun untuk Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
8. **Ahok mengumrohkan Penjaga Masjid/ Musholla (Marbot) dan Makam (Kuncen).** Pada 2014 sebanyak 40 orang, pada 2015 sebanyak 40 orang, pada 2016 sebanyak 50 orang. Dan, pada 2017 direncanakan untuk 100 orang.
9. **DKI Juara Umum Seleksi Tilawah Al-Qur'an (STQ)** tahun 2015, dan diberi bonus Juara 1 senilai Rp40 Juta, Juara 2 senilai Rp30 juta, Juara Harapan 1 senilai Rp12,5 Juta, dan Juara Harapan 2 senilai Rp10 juta. **DKI Jakarta Juara ke-2 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)** 2016 di NTB, dan pemenangnya diberi bonus gaji bulanan selama 2 tahun untuk mengajari ngaji.
10. **Ahok memajukan jam pulang PNS selama bulan Ramadhan** 2016, pkl 14.00 WIB agar bisa buka puasa bersama keluarga.

11. **Perhatian menjelang hari Lebaran** harga-harga sembako naik, ada **diskon untuk pemegang KJP** misalnya daging dari harga Rp120.000/kg di pasaran menjadi hanya Rp39.000/kg dengan KJP.
12. **Rutin memberikan infaq, shadaqoh, dan zakat.** Tahun 2016, zakat Ahok Rp55 juta.
13. **Peduli pada Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh (Bazis) DKI** yang setiap tahun menyalurkan zakat. Tahun 2016 senilai Rp6 Miliar zakat disalurkan ke *mustahiq*.
14. **Selalu berkorban** setiap tahun dari dana pribadi, tahun 2016 memotong 55 ekor sapi untuk warga Rusun dan dikirim ke masjid-masjid, musholla, dan majelis taklim.
15. **Menutup tempat-tempat maksiat**, seperti Lokasi Prostitusi Kalijodo, Diskotik Stadium dan Mille's.

“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah bertanya apa agamamu.”

{ KH Abdurrahman Wahid }



“Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non-Muslim tapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja.”

{ Prof. DR. KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU }

Sumber: <http://news.detik.com/berita/3189642/said-aqil-mending-pemimpin-non-muslim-tapi-jujur-daripada-muslim-tapi-zalim>

“Saya tidak pernah meragukan ke-Indonesia-an Ahok. Terobosan dia bukan hanya soal korupsi saja, tapi ada nilai-nilai yang lain.”

{ Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah }

Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/03/1940511/Syafii.Maarif.Puji.Keberanian.Ahok>





“Kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun level daerah, adalah yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan. Kriteria itu bisa didapat dari seorang pemimpin Muslim maupun non-Muslim, karena keduanya sama-sama punya hak untuk memimpin.”

{ KH. DR. Ahmad Ishomuddin, MA. Rois Syariah PBNU }

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/07394221/pbnu.muslim.dan.non-muslim.berhak.jadi.pemimpin>

“Saya ingin betul-betul menekankan pesan, jangan hancurkan kebhinnekaan kita hanya karena persoalan kekuasaan. Dan ikhlaskan apa yang jadi takdir Allah nanti. Siapapun yang menang harus kita hormati, kita dukung. Kita penuh agenda yang ada di Alquran, yaitu keadilan. Keadilan pada yang lemah supaya bisa mendapat hak-haknya. Dan sekali lagi kekuasaan itu akan dijatuhkan pada orang yang dikehendaki.”



{ KH. Masdar Farid Masudi, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) }

<http://news.detik.com/berita/3326815/dewan-masjid-indonesia-jangan-hancurkan-kebhinekaan-hanya-karena-kekuasaan>

